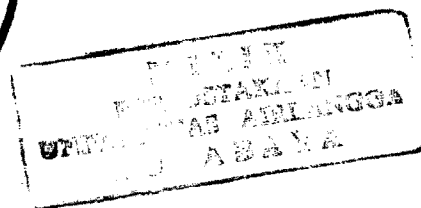


**ANALISIS PENERAPAN REVALUASI AKTIVA TETAP BERDASARKAN  
KMK NO. 384/KMK.04/1998 TERHADAP PAJAK PENGHASILAN DAN  
LABA BERSIH FISKAL PADA PT. "X" SURABAYA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



**Diajukan Oleh**

**MOCHAMAD ARIEF HASANDY  
No. Pokok : 049721387-E**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN REVALUASI AKTIVA TETAP BERDASARKAN  
KMK NO. 384/KMK.04/1998 TERHADAP PAJAK PENGHASILAN DAN  
LABA BERSIH FISKAL PADA PT."X" SURABAYA**

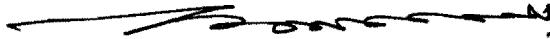
DIAJUKAN OLEH:

**MOCHAMAD ARIEF HASANDY**

**NIM : 049721387-E**

Telah Disetujui Dan Diterima Dengan Baik Oleh:

Dosen Pembimbing,



Dr. Arsono Laksmana, SE, Ak.  
NIP. 130 783 542

Tanggal, .....

Ketua Program Studi Akuntansi,



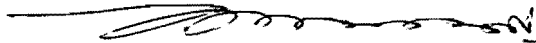
Drs. M. Suyunus, MAFIS., Ak.  
NIP. 131 287 542

Tanggal, 31-3-04 .....

Surabaya, 17-2-2004

Disetujui dengan baik dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,



Dr. Arsono Laksmana, SE, Ak  
NIP. 130 783 542

## ABSTRAKSI

Kebijakan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap telah beberapa kali diterbitkan dan direvisi oleh pemerintah, dimana kebijakan yang terakhir adalah KMK No. 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998. Kebijakan tersebut diterbitkan dengan tujuan terutama agar perusahaan dapat *survive* dalam kelangsungan usahanya. Sebenarnya penilaian kembali aktiva tetap bertentangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang menganut prinsip harga perolehan, tetapi penyimpangan tersebut dimungkinkan atas dasar kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Penilaian kembali aktiva tetap dapat menggunakan berbagai metode penilaian berdasarkan tahun dimana penilaian tersebut dilakukan. Pada tahun 1979 dan 1982 menggunakan penilaian majemuk (multi indeks) yang disesuaikan dengan kelompok aktivanya; misalnya angka perkalian bangunan adalah 2,4 sedangkan mesin 1,8 serta kendaraan 2,9. Pada tahun 1986 menggunakan penilaian angka perkalian tunggal untuk semua golongan aktivanya. Misalnya perusahaan dapat membuat asumsi bahwa semua kelompok aktiva perusahaan direvaluasi dengan mengkalikan 2,75 dari nilai bukunya. Sedangkan metode yang terakhir adalah dengan melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan nilai pasar wajar yang berlaku saat itu atas rekomendasi lembaga penilai (*appraisal*) yang ditunjuk oleh pemerintah.

Penilaian kembali aktiva tetap tersebut di atas dengan metode apapun akan berdampak pada naiknya biaya penyusutan yang pada akhirnya akan menurunkan laba bersih sehingga beban pajak perusahaan akan berkurang. Tetapi sebagai konsekuensi dari revaluasi aktiva tetap tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) final 10% dari selisih lebih penilaian kembali. Menyadari hal tersebut perusahaan seyogyanya memperhitungkan efek dari revaluasi aktiva tetap yang tidak hanya menguntungkan di satu sisi, tetapi juga bisa merugikan, seandainya PPh final yang dibayarkan ternyata melebihi dari penghematan pajak terhutangnya. Oleh karena itu struktur komponen aktiva tetap perusahaan perlu diperhatikan.